

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah yaitu pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, serta kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Yang mana tujuan dari implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengelola penggunaan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis mengatur kehidupan suatu desa diatur oleh pemerintah desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa berkewajiban dapat menjalankan dan mengatur urusannya sendiri. Program- program yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya (Aria, 2019).

Analisis terhadap kinerja pemerintah desa perlu dilakukan untuk melihat keisapan suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dinilai dengan cara melihat kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan. Laporan kinerja anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah desa pada periode yang akan datang dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara komparatif (Habibah, 2019).

Kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola anggaran berhubungan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Ekonomis, merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Konsep ini menekankan terkait dengan seberapa besar organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019).

Proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelola keuangan desa di butuhkan perangkat desa yang memiliki kinerja handal dan di dukung dengan fasilitas yang memadai sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat

dipahami dan di mengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa yang di tuntutan semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi, menjadi daya tarik penulis untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa selama ini, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan terutama 10 dalam menilai apakah pemerintah desa mampu dan berhasil dalam mengelola keuangan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa, atau sebaliknya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas sumber daya yang di kelola pemerintah desa dalam.

Tabel 1.1

Anggaran pendapatan dan belanja Desa matawai Amahu

Tahun	Anggaran	
	Pendapatan	Realisasi
2019	1.281.120.600	1.281.120.600
2020	1.309.784.600	1.309.784.600
2021	1.260.885.500	1.260.885.500
2022	1.182.238.800	1.169.728.000

Tabel 1.1 merupakan pendapatan dan realisasi desa dari tahun 2019 – 2022

Realisasi anggaran yang dimaksud adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan atau sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Pada table 1.1 menunjukan bahwa dana desa yang diterima dari tahun 2019 – 2022 berjumlah cukup besar.

Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Matawai Amahu dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode berjalan atau saat ini dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya mengalami perbaikan atau penurunan. Dalam menganalisis kinerja keuangan Desa Matawai Amahu yaitu dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan berupa analisis rasio Kemandirian, Rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

Peneliti terdahulu mengenai laporan keuangan antara lain yaitu oleh Heti Paramita (2019) dengan judul Jurnal Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Hasil penelitian kuantitatif deskriptif ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, rasio kemandirian

keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan.

Peneliti lainnya yaitu (Maemunah, 2020), dengan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas sangat efektif, tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali, tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%.

Peneliti lainnya yaitu oleh Melina Febi Aawani & Swarmilah Hariani (2021) dengan judul Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015- 2018 dapat dikatakan belum optimal dan berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2018 dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Matawai Amahu,

Kecamatan Katala Hamu Lingu selama ini, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Evaluasi Efisiensi Belanja Pemerintah Desa Berdasarkan Rasio Keuangan Sektor Publik Di Desa Matawai Amahu Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah “Evaluasi Efisiensi Belanja Pemerintah Desa Berdasarkan Rasio Keuangan Sektor Publik Di Desa Matawai Amahu Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur”.

1.3. Persoalan Penelitian

Hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efisiensi belanja Pemerintah Desa berdasarkan Rasio keuangan ?
2. Bagaimana efisiensi belanja pemerintah desa berdasarkan rasio kemandirian ?
3. Bagaimana efisiensi belanja pemerintah desa berdasarkan rasio efektifitas ?

4. Bagaimana efisiensi belanja pemerintah desa berdasarkan rasio pertumbuhan

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan persoalan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini ialah : untuk mengetahui Efisiensi Belanja Pemerintah Desa Berdasarkan Rasio Keuangan Sektor Publik Di Desa Matawai Amahu Kecamatan Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur.

1.4.2 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk belajar dan referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya bagi para penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, serta dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Serasah dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan

perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.